

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
REHABILITASI PASCA TAMBANG GOLONGAN C DI  
KECAMATAN PARANG LOE  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh :

**MUHAMMAD RIZAL**  
Nomor Stambuk : 105640165812



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
REHABILITASI PASCA TAMBANG GOLONGAN C DI KECAMATAN  
PARANGLOE KABUPATEN GOWA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Di susun Dan Diajukan Oleh**

**Muhammad Rizal**

**No Stambuk 105640165812**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  
Rehabilitasi Pasca Tambang Golongan C di  
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizal

Nomor Stambuk : 10564 01658 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II

  
A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi ilmu pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 26 Agustus 2017.

### TIM PENILAI

Ketua

**Ir. H. Saleh Molla, MM**

Sekretaris

**Dr. Burhanuddin, S.sos, M.si**

### Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.Si
3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal

Nomor Stambuk : 105640165812

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 - 09 - 2017

Yang menyatakan



Muhammad Rizal

## ABSTRAK

**Muhammad Rizal 2017.** Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitas pasca tambang golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. (Di bimbing oleh H. Muhlis Madani dan A. Luhur Prianto)

Tujuan penelitian bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merehabilitasi pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam merehabilitasi pasca tambang di kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel keseluruhan sebanyak 10 orang yang merupakan informan penelitian, dan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan yaitu : Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan Lanna, Pegawai Perusda, Pengusaha Tambang, Tokoh Masyarakat, Teknik analisis data yang di gunakan yaitu analisis deskripsi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah sudah berjalan secara maksimal, hal ini karena dalam pelaksanaan rehabilitas pada lahan terganggu yang sudah tidak aktif lagi atau tidak digunakan lagi. Intensifikasi dalam pengaturan lahan, sistem perijinan, pengawasan, dan ekstensifikasi dalam aspek fisik, aspek biologi, revegetasi sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Rehabilitasi pasca tambang

## KATA PENGANTAR



Tak ada kata ataupun kalimat yang pantas terucap selain ungkapan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada A. Luhur Prianto, S.IP., M. Si sebagai pembimbing II dan pembimbing I DR. H. Muhlis Madani, M. Si, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR. H. Rahman Rahim, SE., MM.
2. Dekan Fakultas Fisipol DR. H. Muhammad Idris, M. Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Andi Luhur Prianto, S.IP, M. Si yang telah membina jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dosen Ilmu Pemerintahan, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

5. Kepada keluargaku yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis tak pernah berputus asa dalam menghadapi kemelut hidup dan selalu mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada sang pencipta.
6. Terima kasih teman-teman sekelas dan leting 2012 yang tak dapat kusebutkan satu persatu.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin. Amin

Makassar, 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Strategi Pemerintahan.....	7
B. Konsep Pemerintahan Daerah.....	24
C. Konsep Rehabilitasi Tambang.....	26
D. Kerangka Pikir .....	33
E. Fokus Penelitian.....	34
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Pengabsahan Data .....	41
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
B. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Merehabilitasi Pasca Tambang Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa .....	50
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Merehabilitasi Pasca Tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa .....	68

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sektor pertambangan yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelolah sendiri potensi daerahnya yang lebih luas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Jenis barang tambang yang dapat dilakukan proses mining antara lain :

1. Barang tambang golongan A. Merupakan barang tambang strategis barang tambang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis dalam menjamin perekonomian negara dan sebagian besar di ijin untuk di miliki oleh pemerintah. Contoh: minyak, uranium, plutonium
2. Barang tambang golongan B. Merupakan barang tambang vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contoh : emas, perak dan tembaga.
3. Barang tambang golongan C. Merupakan barang tambang yang tidak strategis dan tidak vital, yang tidak secara langsung dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contoh : garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing , pemanfaatan potensi alam tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap pada aturan dan norma yang harus di taati dan di sepakati. Galian golongan C adalah bahan tambang yang biasanya di gunakan pembangunan infrastruktur, bangunan pribadi,

swasta maupun pemerintah. Bahan galian golongan C semuanya di eksplorasi dan di kelolah oleh pihak swasta. Pengelolaan pihak swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah. Lokasi galian golongan C ini sangat dekat dengan pemukiman masyarakat desa, maka biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pengumpul pasir di tambang galian golongan C.

Tambang galian golongan C merupakan tambang yang dapat di manfaatkan untuk membangun suatu daerah. Pemanfaatan tambang galian golongan C sebagai sumber daya ekonomi oleh daerah semakin terbuka seiring di gulirnya system pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah . dengan otonomi daerah, pemerintah daerah di beri kewenangan yang lebih luas untuk mengelolah daerahnya, termasuk mengelolah sumber daya alam yang dimilikinya. Sebaliknya, kewenangan itu dapat menjadi pemicu terjadinya bencana alam apabila pemanfaatan sumber daya alam itu tidak dilakukan secara berkelanjutan. Keberpihakan pada pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip lestari, tergantung pada pemimpin yang sedang memerintah dan memangku kepentingan lain. Apabila pemanfaatan sumber daya alam melebihi daya dukungnya dan tidak memperhatikan konsep ekologis, maka yang akan terjadi kemudian adalah tanah longsor, kekeringan dan temperatur udara semakin tinggi. Suatu daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas dengan pengelolaanya hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi dari sumber daya alam tersebut, hal ini akan mempercepat bencana terjadi.

Kegiatan pembangunan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan ,

karena tambang seringkali ditingalkan begitu saja dan tidak di rehabilitasi sehingga menyebabkan penurunan mutu lingkungan, berupa kerusakan ekosistem yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia sendiri. Pada lahan bekas tambang galian golongan C masalah yang ada adalah perubahan lingkungan, perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul. Permasalahan yang kedua muncul dari pengelolaan galian golongan C di daerah ini adalah kerusakan lingkungan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian golongan C tersebut dari lokasi tambang menuju konsumen, hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya tambang galian golongan C di daerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar sehingga tidak mampu menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar (tonase muatan tidak sebanding dengan tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya jalan menuju desa menjadi galian golongan C tersebut rusak parah, untuk itu diperlukan adanya suatu kegiatan sebagai upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat di tempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih, mendekati atau bahkan lebih baik dibanding kondisi semula, dan salah satu cara adalah mereklamasi lahan.

Lingkungan hidup adalah, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup terdiri dari lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial. Dua komponen tersebut menjadi interaksi dan menghasilkan hubungan dinamis, sehingga setiap perubahan yang terjadi pada salah satu komponeng lingkungan lainnya. Kegiatan penambangan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat positif maupun negative. Dampak positif kegiatan penambangan antara lain memberi nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan perekonomian sektor dan subsektor lain di sekitarnya. Kegiatan pertambangan tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukun lingkungan, serta di kelola dengan baik dapat menimbulkan dampaknegatif terhadap lingkungan. Dampak negatif akibat dari kegiatan penambangan antara lain: turunnya produktivitas tanah, akibat tanah menjadi tandus atau gundul, kerusakan jalan yang di lalui kendaraan pengangkut bahan tambang.

Setiap pertambangan mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi lahan penambangan, baik selama maupun setelah kegiatan penambangan selesai. Perusahaan penambangan besar pada umumnya telah melaksanakan rehabilitasisesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen (AMDAL), sedangkan perusahaan penambangan yang berskala lebih kecil, termasuk galian golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa harus melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang galian golongan C. Rehabilitasi pengelolaan tambang ini sangat penting dilakukan agar pemerintah dan masyarakat sekitar tambang mengetahui dengan jelas proses pengelolaan pertambangan dari proses

hulu hingga hilir sehingga di harapkan bisa berpartisipasi dalam pengelolaan tambang di daerahnya.

Menurut Rahim dkk (2012) bahwa peran pemerintah cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Masalah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam galian golongan C adalah besarnya bahaya kerusakan lingkungan, apabila nilai kerusakan lingkungan dapat di ketahui maka persiapan pencegahan kerusakan lingkungan dapat di rencanakan dengan tepat. Orang yang menentukan nilai bahaya dalam kerusakan lingkungan tidak cukup menguasai sifat-sifat kerusakan lingkungan, tetapi harus dapat menganalisa dan menggunakan data dan keterangan mengenai faktor-faktor yang menentukan kerusakan lingkungan dalam metode dan manajemen kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan harus diatasi dengan baik dalam rangka meminilisir jumlah kerusakan lingkungan dan dampak negatif yang di timbulkannya melalui kegiatan pencegahan.

Melihat permasalahan tambang galian golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupateng Gowa. Maka saya melakukan penelitian yang berkaitan tentang bagaimana **“Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitasi pasca tambang golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupateng Gowa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Di lihat dari latar belakang masalah seperti yang di uraikan, maka penulis merumuskan maslah-masalah yang akan di teliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merehabilitas pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ?
2. Apa saja menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam merehabilitasi pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merehabilitas pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui Apa saja menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam merehabilitasi pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Di tinjau dari segi (manfaat teoriti). Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitas pasca tambang golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupateng Gowa.

Di tinjau dari segi (manfaat praktis) berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitas pasca tambang golongan C di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Strategi Pemerintahan**

Ada beberapa macam pengertian strategi menurut para ahli dan bukukunya masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.

Terdapat delapan dimensi (Wechsler dan Backoff, 1986:322-4), yakni:

1. Derajat pengaruh eksternal (*strength of external influence*)
2. Lokus pengendalian strategi (*locus of strategic control*)
3. Pencetus aksi strategis (*impetus for strategic action*)
4. Orientasi strategi (*strategic orientation*)
5. Orientasi pada perubahan (*orientation toward change*)
6. Cakupan manajemen strategis (*scope of strategic management*)
7. Derajat aktivitas manajemen strategis (*strategic management activity level*);
8. Arah pergerakan strategi (*direction of strategic movement*)

Dari delapan dimensi tersebut, sebagian bersifat internal dan sebagian lainnya bersifat eksternal.

Dimensi pertama, kedua, ketiga sepertinya saling terkait. Derajat pengaruh eksternal diartikan untuk menilai besarnya pengaruh variabel eksternal, khususnya usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor eksternal, dalam mempengaruhi pilihan strategi yang di buat oleh agensi pemerintahan. Dimensi ini mengukur

besarnya usaha yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mempengaruhi perencanaan strategi, yakni proses dan isi. Dimensi pertama ini langsung dikaitkan dengan dimensi kedua, yakni lokus pengendalian strategi. Dimensi kedua, yakni lokus pengendalian strategi. Dimensi kedua ini merupakan hasil (*outcomes*) dari pengaruh variabel eksternal, yaitu apakah aktor-aktor strategi dalam organisasi benar-benar mampu mengendalikan orientasi strategi (*internal*) atau justru dikendalikan oleh pemangku kepentingan yang berasal dari luar organisasi (*eksternal*). Jadi variabel ini menggambarkan seberapa kuat sesungguhnya organisasi bertahan dari pengaruh luar. Dimensi ketiga, pencetus aksi strategis, digunakan untuk menduga apakah inisiatif melakukan rancangan strategi lebih merupakan reaksi terhadap lingkungan atau secara sengaja organisasi melakukan antisipasi pada perubahan lingkungan. Jawabannya adalah apakah organisasi lebih bersifat reaktif atau proaktif.

Sisa dimensi yang lain lebih menunjuk secara spesifik karakter strategi yang hendak dipilih, yakni derajat perubahan, kedalaman strategi, tingkat aktivitas, dan arah pergerakan strategi. Organisasi bisa memilih perubahan yang bersifat fundamental terhadap dirinya sendiri dan berkaitannya dengan lingkungannya. Bisa juga melakukan pilihan dengan derajat incremental saja atau bahkan sama sekali tidak berkehendak untuk berubah. Cakupan strategi bisa sampai pada bidang garapan yang luas, sempit, atau moderat. Pilihan pada salah satu kemungkinan bergantung pada lingkungan, preferensi pemangku kepentingan, dan kapasitas organisasi.

Tingkat aktivitas manajemen strategic diartikan untuk menunjuk derajat tinggi rendahnya usaha (*efforts*) dan perhatian (*attention*) pada isu atau agenda strategis tertentu. Manajemen “*may appear to be passively drifting*”. Variabel terakhir digunakan untuk menunjuk arah pergerakan strategi, yaitu apakah strategi lebih diarahkan pada proses internal organisasi, misalnya pada intensifnya pengawasan, efisien organisasi, dan peningkatan kapasitas.

Boyne dan walker (2004: 238) dan Walker (210: 230) memberikan analisis kritis pada delapan dimensi tersebut. Jika dibuat ringkas, dimensi-dimensi tersebut merupakan gabungan antara dimensi berkaitan dengan proses dan isi strategi.

Cirri-ciri yang terdapat pada delapan dimensi strategi kemudian digunakan secara teoritis untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing strategi. Keempat jenis-jenis strategi itulah kemudian dinamai sebagai tipologi strategi model W-B.

#### a. Strtegi Pengembangan

Suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda di masa depan. Organisasi sepenuhnya diletakkan dan dioprasikan dalam model pengembangan. Lebih lanjut Wechsler dan Backoff (1986: 323) menyatakan bahwa strategi pengembangan dirancang berdasarkan kesadaran dan bahkan memperhatikan faktor eksternal dan kekuatan, tetapi dorongan dari tindakan bersifat internal, merupakan lokus

dan tindakan mengambil kisanan atas agen dan luas, mencerminkan berbagai isu dan kekawatiran yang mempenaruhi organisasi.

Bryson (1995: 280) menambahkan bahwa strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan yang baru yang lebih baik. Pilihan pada strategi ini baru bisa di laksanakan jika dukungan yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi memadai.

b. Strategi Transformasi

Suatu strategi dikatakan sebagai strategi transformasi ketika komitmen pokok organisasi diarahkan untuk menghasilkan perubahan fundamental. Pada umumnya, pilihan pada strategi ini di pengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan di luar organisasi. Akibatnya tidak jarang arah strategis organisasi, kemudian, menjadi lebih dekat dengan tuntutan (*demands*) yang dating dari luar disbanding dengan aspirasi yang berkembang di dalam organisasi. Lebih jauh, Wechsler dan Backoff (1986: 324) menyatakan tingkat control yang tinggi eksternal, organisasi dengan strategi transformasional biasanya memiliki kebijakan atau orientasi politik.

Boyne dan Walker (2004: 237) berpendapat bahwa strategi transformasi ini serupa dengan kombinasi antara strategi prospektif dan reaktif (*reactor*) model miles dan Snow (1978). Lebih dekat dengan prospektif karena di dalam strategi ada elemen perubahan, dan di saat yang sama ada elemen reaktif karena pendorong lahirnya strategi lebih karena adanya perubahan fundamental yang terjadi di luar organisasi.

c. Strategi Protektif

Strategi protektif lahir karena adanya potensi ancaman yang berasal dari lingkungan luar organisasi dan di saat yang sama kapasitas organisasi yang dimiliki (semakin) terbatas. Dengan demikian, strategi ini pada prinsipnya berusaha mengakomodasi pengaruh negatif yang begitu besar yang datang dari luar sembari mempertahankan *status quo* organisasi. Sebisa mungkin posisi ekonomi politik organisasi dijaga untuk tidak menurun secara tajam. Sekalipun secara riil lahirnya strategi ini bisa berdasarkan latar belakang organisatoris, menurut Wechsler dan Backoff (1986: 324), implementasi strategi “*sering dimainkan di jangka politik*”.

d. Strategi Politik

Berbeda tiga jenis strategi yang telah di jelaskan terlebih dahulu yang hanya memiliki deskripsi tunggal, strategi politik memiliki setidaknya wajah ganda. Pada kemungkinan pertama, strategi politik terlihat ketika esensi strategi lebih di tunjukkan untuk melakukan akomodasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang berasal dari luar organisasi dan di saat yang sama diarahkan untuk membatasi tekanan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Wajah lain terlihat ketika strategi organisasi di gunakan sebagai alat oleh partisan (baca: faksi) politik dalam organisasi dan di jadikan dasar untuk memberikan ganjaran (*reward*) kepada pendukung masing-masing. Organisasi serta pada pilihan kebijakan dan program.

Boyne dan Walker (2004: 237) tidak mengategorikan strategi politik model W-B sebagai salah satu tipologi isi strategi. Mereka menilainya hanya sebagai proses strategi, yaitu bagaimana strategi dibuat.

Marrus (2002:31) mendefenisikan strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Strategi pada umumnya akan membahas tentang penerapan tujuan jangka panjang dan arah tindakan untuk mencapai arah dan tujuan yang akan di capai tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan, dengan adanya strategi pada setiap tindakan yang akan dijalankan dapat berguna sebagai petunjuk jalan harus seperti apa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di awal.

Menurut Blueck dan Jaunch ( dalam Saladin, 2003:54) Defenisi strategi sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang direncanakan untuk memastikan bahawa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa faktor penting dalam strategi, yaitu:

- a. Adanya rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan
- b. Adanya analisis terhadap lingkungan
- c. Strategi dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dicapai.

Pernyataan diatas juga didukung oleh Mulyana (dalam Umar, 2002:43) menjelaskan ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat unsur penting dalam pengertian

strategi, yaitu kemampuan sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Rumusan strategi paling tidak mesti memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasikan, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan, hasil apa yang akan diperoleh.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Andrews (dalam Kuncoro, 2004:44) tentang strategi yaitu pola sasaran, tujuan dan kebijakan atau rencana umum untuk meraih tujuan yang ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Pendapat Itami (dalam Kuncoro, 2004:53) tentang strategi yaitu penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan strategi.

Menurut Kuncoro (2004) strategi berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Ide bahwa strategi “menetapkan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya “ menyatakan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif

perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif.

Menurut Craig dan Grant (1996 : 10), strategi yang berhasil adalah strategi yang berhasil mengombinasikan empat karakteristik utama, sebagai berikut:

1. Sasaran sederhana jangka panjang. Landasan setiap strategi organisasi harus merupakan kejelasan dari sasaran. Kalau tidak ada konsensus dan konsisten dari sasaran, strategi tidak dapat memberikan stabilitas dan kesatuan arah.
2. Melalui analisis lingkungan.
3. Penilaian sumberdaya yang efektif
4. Penerapan yang efektif. Strategi yang paling cemerlang tidak berguna jika tidak diterapkan secara efektif. Penerapan yang efektif memerlukan pembentukan kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem manajemen yang dapat memegang teguh komitmen dan koordinasi seluruh pegawai, dan mobilisasi sumberdaya untuk melengkapi strategi tersebut.

Ada delapan langkah proses perencanaan strategi menurut Hery (2013 : 88):

1. Mengidentifikasi misi ( tujuan ) dan strategi terkini organisasi.

Pendefinisian misi organisasi memaksa manajer untuk secara cermat mengidentifikasi lingkup produk jasa yang ditawarkan organisasi. Penting pula bagi manajer untuk mengidentifikasi sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang digunakan. Sebagai dasar perencanaan, sasaran menjadi target kinerja (yang dapat diukur) dan diusahakan untuk dapat dicapai oleh



para karyawan. Dengan mengetahui sasaran terkini organisasi, manajer memiliki dasar untuk menentukan apakah sasaran tersebut perlu diubah.

2. Menganalisis lingkungan eksternal organisasi.

Menganalisis lingkungan merupakan langkah yang menentukan keberhasilan proses strategi karena sebagian besar lingkungan organisasi mendefinisikan pilihan-pilihan yang tersedia bagi manajemen. Strategi dikatakan berhasil jika strategi tersebut bersesuaian dengan lingkungan.

3. Menganalisis sumber daya dan kemampuan organisasi.

Sangat penting bagi manajer untuk menyadari bahwa setiap organisasi dihadapkan pada kendala sumber daya dan keterampilan yang dimilikinya. Analisis internal mengenai sumber daya memberi manajer informasi berharga tentang sumber daya dan kemampuan spesifik organisasi. Apabila keterampilan atau sumber daya yang dimiliki organisasi tergolong unggul atau unik, maka keterampilan atau sumber daya tersebut akan menjadi kompetensi inti organisasi.

4. Mengidentifikasi peluang dan ancaman.

Setelah menganalisis lingkungan eksternal organisasi, para manajer selanjutnya mengidentifikasi peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, termasuk ancaman apa saja yang harus dihadapinya. Peluang adalah kecendrungan positif faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan yang sama dapat memberikan peluang bagi organisasi tertentu, dan kebalikannya dapat menjadi ancaman bagi organisasi lain.

5. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

#### 6. Merumuskan strategi.

Perumusan strategi dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya pengambilan keputusan. Para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi yang akan memberikan keunggulan yang kompetitif bagi organisasi.

#### 7. Mengimplementasikan strategi.

Setelah strategi dirumuskan, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan strategi. Strategi dikatakan berhasil jika implementasinya juga berhasil.

Ekowati, dkk. dalam Anonim (2012), bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan (strategi), dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan (strategi) dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan (strategi) itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

#### 8. Mengevaluasi hasil.

Mengevaluasi hasil merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen strategis. Langkah ini memungkinkan bagi manajer untuk mempertimbangkan perlu tidaknya penyesuaian atau perubahan terhadap strategi yang ada. Strategi yang baik sekalipun akan dapat gagal jika tidak diimplementasikan dan dievaluasi sebagaimana mestinya.

Llwellyn dan Tappin dalam Muhammad (2013), mengatakan bahwa pemerintahan berstrategi bukan sesuatu yang begitu saja bisa dengan mudah untuk diwujudkan. Menurut Mulgan dalam Muhammad (2013), karakteristik khas

pemerintahan menjadikannya lebih mudah untuk diarahkan meraih hal-hal yang termasuk dalam kategori sedang-sedang saja. Tidak mudah berpikir panjang dan rasional, apalagi disertai dengan target dan kinerja yang luar biasa. Jika politisi dan birokrat pemangku kekuasaan ternyata tidak memiliki waktu yang cukup panjang dalam memerintah, maka mereka akan cenderung menempatkan kepentingan mereka pada prioritas yang lebih tinggi dari kepentingan publik (Mulgan dalam Muhammad, 2013). Dalam kalimat lain Muhammad (2013) mengatakan bahwa diperlukan rekayasa politik jika dikehendaki adanya pemerintahan yang memiliki orientasi strategis dengan persediaan energi yang melimpah dan tingkat kesabaran yang tinggi.

Moore dalam Muhammad (2013), manajer publik merupakan manajer strategi, bukan sekedar teknisi. Ada tiga komponen sebagai penguji efektivitas peran strategis manajer publik, yaitu :

1. *Publik value outcomes*, menunjuk pada elemen baru dalam manajemen publik yang membedakannya dengan administrasi publik klasik.
2. *Authorizing environment*, memiliki karakter lebih politik, yang berhubungan dengan legitimasi eksistensial organisasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya.
3. *Operational capacity*, memiliki karakter lebih sebagai manajemen.

Terdapat delapan dimensi strategi menurut Wechsler dan Backoff dalam Muhammad (2013), yakni:

1. Derajat pengaruh eksternal, diartikan untuk menilai besarnya pengaruh variable eksternal, khususnya usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor

eksternal, dalam mempengaruhi pilihan strategi yang dibuat oleh agensi pemerintahan.

2. Lokus pengendalian strategi, merupakan hasil dari pengaruh variabel eksternal, yaitu apakah aktor-aktor strategi dalam organisasi benar-benar mengendalikan orientasi strategi (internal) atau justru dikendalikan oleh pemangku kepentingan yang berasal dari luar organisasi.
3. Pencetus aksi strategis, digunakan untuk menduga apakah inisiatif untuk melakukan rancangan strategi lebih merupakan reaksi terhadap lingkungan atau secara sengaja organisasi melakukan antisipasi pada perubahan lingkungan.
4. Orientasi strategi diartikan untuk menunjuk tujuan strategis yang hendak dicapai oleh organisasi. Tujuan strategis tersebut dapat berupa salah satu atau kombinasi dari tiga kemungkinan, yaitu politik, organisatoris, dan kebijakan. Organisasi dengan tujuan politis, bertujuan untuk memuaskan kepentingan aktor politik, atau pengendali kebijakan. Tujuan organisatoris, diwujudkan dengan meningkatkan kerja riil, sumber daya yang dimiliki, dan kompetensi organisasi. Orientasi kebijakan, dilaksanakan dengan memberikan perhatian dan dukungan pencapaian pada kebijakan pada satu komunitas tertentu dalam organisasi.
5. Orientasi pada perubahan
6. Cakupan manajemen strategik
7. Derajat aktivitas manajemen strategik

Apalagi para pengambil keputusan telah melihat peluang yang tersedia dan

ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat maka organisasi itu menghadapi isu stratejik yang dapat disebut *comparative advantage* (keunggulan komparatif).

Elemen stratejik yang paling baik bertemu sehingga para eksekutif tidak boleh membiarkannya hilang, tetapi sebaliknya harus memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya. Sel A ini memberi kemungkinan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungan. Pertanyaannya ialah bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

Sel B yaitu isu stratejik *mobilization*, adalah kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Di sini para eksekutif hendaknya berusaha memobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kalau mungkin dapat mengubahnya sebagai peluang.

Pada sel C, tampil isu stratejik *investment / divestment* yang memberi pilihan bagi para eksekutif karena situasinya kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi untuk menggarapnya dan memberikan reaksi positif. Kalau dipaksakan, bisa memakan biaya terlalu besar sehingga merugikan organisasi. Lebih baik tinggalkan dan serahkan kepada organisasi lain yang mungkin memiliki organisasi yang lebih baik. Bisa juga para eksekutif tidak berbuat apa-apa. Harusnya organisasi menahan investasi untuk memperkuat titik lemahnya sehingga mampu mengubah dan memperbaiki posisi

kompetitifnya.

Sel yang terakhir adalah sel D, yaitu kotak paling lemah dari semua sel karena dapat membawa bencana bagi organisasi, paling tidak merugikan program-program. Sudah terancam dari luar, lalu dihadapkan pada sumber daya yang sangat lemah. Strategi yang harus ditempuh ialah mengendalikan kerugian yang diderita sehingga tidak separah dengan yang diperkirakan. Hal itu dapat dilakukan dengan sedikit demi sedikit membenahi sumber daya, dengan harapan mampu memperkecil ancaman dari luar tersebut. Usaha itu diarahkan pada upaya mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, memungkinkan memakan waktu lama.

### **Formulasi Strategi melalui Analisis SWOT**

Analisis-analisis yang menggunakan pendekatan SWOT ini merupakan suatu bentuk lompatan pemikiran yang menawan bagi upaya merumuskan strategi apa yang diperlukan, dikarenakan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan organisasi yang manakah perlu diperkuat, serta penguatan-penguatan seperti apakah yang dapat diupayakan untuk menciptakan nilai. Lalu, peluang-peluang manakah yang memang berguna untuk dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan manakah yang dicermati merupakan ancaman-ancaman dimana organisasi perlu bersiap-siap mempersenjatai diri untuk menghadapainya. (Finlay dalam Heene dkk., 2010 : 148)

Menurut Heene dkk., (2010 : 148) kisi pertama pada analisis SWOT tak lain diarahkan ke dalam diri organisasi itu sendiri. Berdasarkan analisis-analisis yang sistematis dilakukan upaya untuk (a) menginventarisasikan kuantitas dan kualitas dari sarana-sarana finansial, Sumber Daya Manusia (SDM), berikut sarana fisik;

(b) memahami bagaimana perkembangan-perkembangan yang spesifik serta pengkoordinasian dan pencatatan sarana-sarana keorganisasian yang mempengaruhi kapasitas-kapasitas penciptaan nilai dari organisasi. Kisi kedua pada analisis SWOT menurut Pierce dalam Heene dkk. (2010 :149) memfokuskan diri terhadap lingkungan eksternal dari organisasi. Luasnya jangkauan lingkungan eksternal suatu organisasi dapat kita tentukan batasannya, yakni mencakup semua variabel-variabel eksternal dan kekuatan-kekuatan yang menentukan posisi strategikal dari organisasi serta yang mempengaruhi alternatif-alternatif strategisnya.

Vermeyden dalam Heene dkk. (2010 : 149) lingkungan eksternal dari suatu organisasi tak lain adalah sumber ketersediaan peluang ataupun ancaman-ancaman bagi organisasi itu. Adapun peluang-peluang adalah faktor-faktor eksternal yang menyediakan kesempatan untuk merealisasikan rencana-rencana sasaran organisasi dengan lebih lancar, lebih cepat, serta dengan biaya yang lebih ringan dan langkah yang semakin gampang, disamping itu juga tentunya untuk membuka jalan memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya, ancaman-ancaman dapat melemahkan organisasi dan mengganggu kesinambungan akan keberadaannya (Vermeyden dalam Heene dkk., 2010:148)

Menurut Vermeyden dalam Heene dkk. (2010:151) ada baiknya sewaktu berbagai komponen analisis SWOT tengah diinventarisir, maka dianjurkan untuk menyusunnya dalam suatu matriks dialektis SWOT. Suatu matriks dialektis SWOT pada akhirnya akan menunjukkan ke arah mana opsi-opsi strategis dari

organisasi dapat diformulasikan agar kelak tercipta penyesuaian seoptimal mungkin antara kiprah organisasi dengan lingkungannya.

Menurut Frida Rissamasu (2010) Intensifikasi adalah melakukan pengaturan usaha penambangan, indikatornya adalah pengaturan lahan, sistem perijinan dan pengawasan bahan galian golongan C.

a. Pengaturan lahan

Pengaturan lahan dilakukan dengan tujuan agar lahan yang digunakan untuk lokasi tambang tidak mengganggu area tempat tinggal penduduk sekitar.

b. Sistem Perijinan

Sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pembukaan lahan pertambangan menyatakan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Dimana pembukaan lahan pertambangan tersebut membutuhkan izin sebagaimana yang tertera pada aturan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 mengenai

a) Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan b) izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

c. Pengawasan bahan galian golongan C

Pengawasan bahan galian untuk melakukan kegiatan pertambangan dirasakan sangat penting. Dimana kegiatan pertambangan banyak memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Sistem pengawasan



yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan kegiatan angkutan hasil galian tambang di lokasi tersebut, untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Ekstensifikasi adalah menyediakan wilayah khusus penambangan dengan memperhatikan fungsi lahan. Indikatornya adalah adanya tempat khusus penambangan menurut jenis bahan galian. Adanya tempat umum khusus penambangan menurut jenis bahan galian adalah upaya yang sangat sesuai untuk memberikan jaminan keamanan dan kelestarian lingkungan. Berikut adalah indikator- indikator yaitu: Aspek fisik, Aspek biologi, Asp, dan Revegetasi.

1. Aspek fisik adalah kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohong maupun *cover crop*. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kwaliatas taanah.
2. Aspek biologi adalah Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan local, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentang terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasaakan sulit berhasil.
3. Revegatasi adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas tambang

sebagai usaha menghindari erosi lahan, membangun habitat bagi satwa liar, memperbaiki produktivitas dan kestabilan tanah, memperbaiki kondisi lingkungan.

Seperti yang diketahui bahwa usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

## **B. Konsep Pemerintah Daerah**

Pemerintah dalam bahasa Inggris bias disebut sebagai *government*, dimana kata itu berasal dari istilah Yunani *gubernaculum* yang artinya kemudi. Pemerintah biasa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Adapun didalam ilmu pengetahuan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintah, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan

persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Nisjar dalam Sunarso (2012 :172) istilah *goverence* secara farifah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya *guildin*. Hal ini juga senanda dengan Budi (2009 :19) yang mendefinisikan pengertian pemerintah secara etimologi kata “Perintah” atau “menyuruh” atau “disuruh”, artinya melakukan suatu kegiatan, yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan “memerintah” atau “diperintah”. Dengan demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atau menyuruh, dan di perintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang di perintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Setelah di tambahkan awalan “Pe” menjadi “Pemerintah”, dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara keduanya adalah merupakan Undang-Undang yang setingkat selain itu keduanya juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Pasal 23). Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimuat pula bahwa setiap izin eksplorasi yang diterbitkan harus memuat dokumen AMDAL. Untuk izin usaha operasi produksi, harus juga memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi lahan yang telah ditambang. Jika melihat hal tersebut keduanya adalah merupakan undang-undang yang berlapis dan keduanya juga memiliki sifat kekhususan masing-masing.

### **C. Konsep Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang**

Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsure produksi media mengatur tata air maupun sebagai unsure perlindungan alam dan lingkungan. Revegetasi merupakan suatu kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang, yaitu reklamasi, yang merupakan upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar bisa menjadi daerah bermanfaat dan berdayaguna. Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi rona awal. Sebuah lahan atau gunung yang dikupas untuk diambil isinya hingga kedalaman ratusan meter bahkan sampai

seribu meter. walaupun sistem gali timbun (*back filling*) diterapkan tetap akan meninggalkan lubang besar seperti danau (Herlina, 2004).

Pada prinsipnya kawasan atau sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui rehabilitasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Kegiatan rehabilitasi dilakukan merupakan kegiatan yang terus menerus dan berlanjut sepanjang umur pertambangan sampai pasca tambang.

Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaikan dengan tataguna lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.

Teknik rehabilitasi meliputi *regarding*, *reconturing*, dan penanaman kembali permukaan tanah yang tergradasi, penampungan dan pengelolaan racun dan air asam tambang (AAT) dengan menggunakan penghalang fisik maupun tumbuhan untuk mencegah erosi atau terbentuknya AAT. Permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan rencana reklamasi meliputi :

Pengisian kembali bekas tambang, penebaran tanah pucuk dan penataan kembali

lahan bekas tambang serta penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali.

Stabilitas jangka panjang, penampungan *tailing*, kestabilan lereng dan permukaan timbunan, pengendalian erosi dan pengelolaan air Keamanan tambang terbuka, longsoran, pengelolaan B3 dan bahaya radiasi Karakteristik fisik kandungan bahan *nutrient* dan sifat beracun *tailing* atau limbah batuan yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan revegetasi Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, potensi terjadinya AAT dari bukaan tambang yang terlantar, pengelolaan *tailing* dan timbunan limbah batuan (sebagai akibat oksidasi sulfida yang terdapat dalam bijih atau limbah batuan) Penanganan potensi timbulnya gas metan dan emisinya dari tambang batubara (Karliansyah, 2001).

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau tindakan atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses yang disertai usaha pertumbuhan tersebut, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh yang lebih baik.

Pujiono (1992:23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetep dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini, unsur – unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian, kedua unsure ini merupakan alah untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada

tujuan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di kabupaten Gowa, maka pengelolaan penambangan merupakan suatu proses kegiatan yang didalamnya terdiri dari unsur yang paling mendukung satu sama lain, yaitu pemerintah, masyarakat memiliki hak ulayak dan pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan C dapat secara baik memanfaatkan potensi sumber daya alam local sesuai dengan kondisi daerah sehingga tujuan pembangunan di kabupaten Gowa dapat dicapai tanpa merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Ketentuan umum dalam undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan:

1. Bahan mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Bahan galian adalah unsur – unsur kimia, mineral – mineral, biji – biji dan segala macam batuan termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam.
3. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batu bara dan mineral ikutannya.
4. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkaih pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
5. Izin usaha pertambangan adalah isin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

6. Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
7. Pengelolaan pertambangan adalah pengelolaan pertambangan yang berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan; keperpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif; transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
9. Study kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan dengan menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
10. Reklamasi tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, emulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya adalah merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa terjadinya suatu endapan bahan galian tersebut memerlukan waktu yang sangat Lama (dalam ukuran waktu geologi), maka di dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya harus benar – benar dapat optimal. Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi,



petageologi, penyediaan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL untuk suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

Bahan galian tambang sebagian besar di temukan pada daerah daerah yang terpencil dengan hutang yang lebat, berupa daerah perbukitan ataupun bergunung dan dataran dengan kondisi lingkungan yang belum terganggu; bahkan mungkin kehidupan sosial pada daerah tersebut masih belum tersentuh oleh perkembangan kemajuan teknologi. jadi pada awalnya interaksi antara komponen – komponen lingkungan di daerah – daerah tersebut diatas berbeda dalam keseimbangan, maka keseimbangan alam tersebut akan terganggu dan menimbulkan perubahan yang mendasar atau yang biasa di sebut dampak.

Dampak perkembangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a) Aspek fisik

Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohong maupun cover crop. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah

b) Aspek Kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang bersal dari kegiatan pertambangan yang sangat melampaui mutu-mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga

mempunyai potenssi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power plant, gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot bbm, dll.

c) Aspek Biologi

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan local, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentang terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasaakan sulit berhasil.

d) Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa Negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sector perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat di hindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

e) Reklamasi Tambang

Reklamasi adalah upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi suatu perencanaan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan

dimana keadaan lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan.

f) Pengawasan

Pengertian dasar pengawasan adalah kegiatan menghimpun, meneliti, membandingkan dan menilai bukti yang terukur guna mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari bukti yang terukur tersebut dengan criteria yang telah di tetapkan dan dilakuksn oleh seseorang yang kompeten dan independen.

**D. Kerangka Pikir**

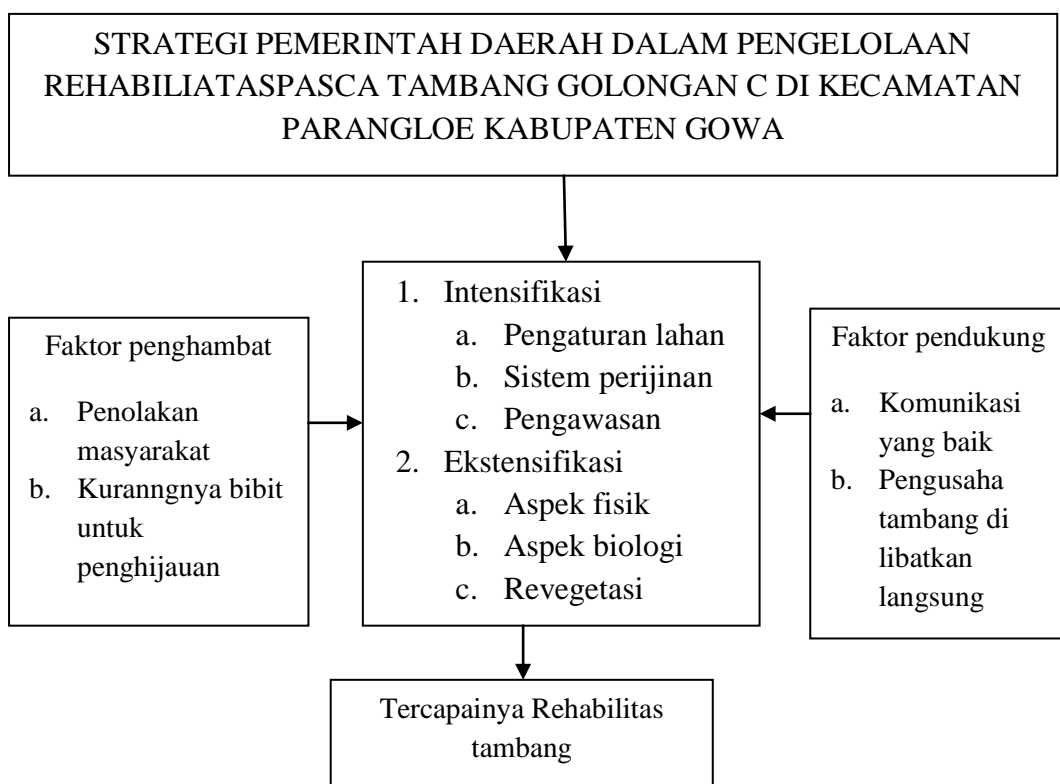
Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau tindakan atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses yang disertai usaha pertumbuhan tersebut, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh yang lebih baik.

Pentingnya rehabilitasi untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi lahan pasca tambang sesuai peruntukannya, mengharuskan pemerintah mewajibkan rhabilitasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Patuh dan tidak patuhnya pemegang IUP terhadap ketentuan untuk pelaksanaan rehabilitasi dari pemerintah adalah tergantung pada strategi pemerintah dan bagaimana strategi tersebut diimplementasikan, serta bagaimana perencanaan strategi yang turut menentukan efektifitas suatu strategi.

Sebelum merumuskan strategi, pemerintah harus mengidentifikasi misi yang hendak diwujudkan agar strategi yang dirumuskan dapat searah dengan misi tersebut

Bagan Karangka Pikir

#### KERANGKA PIKIR:



#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan rehabilitasi pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?

## **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

### **1. Intensifikasi**

Intensifikasi adalah melakukan pengaturan usaha penambangan, indikatornya adalah pengaturan lahan, sistem perijinan dan pengawasan bahan galian golongan C. berikut adalah indikator- indikator yaitu: pengaturan lahan, sistem perijinan, dan pengawasan.

#### **a. pengaturan lahan**

Pengaturan lahan dilakukan dengan tujuan agar lahan yang digunakan untuk lokasi tambang tidak mengganggu area tempat tinggal penduduk sekitar. Seperti yang di katakan Pemerintah Kecamatan adalah

#### **b. sistem perijinan**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pembukaaan lahan pertambangan menyatakan bahwa Penambangan perlu izin usaha

#### **c. pengawasan**

Pengawasan bahan galian untuk melakukan kegiatan pertambangan dirasakan sangat penting. Dimana kegiatan pertambangan banyak memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya

### **2. Ekstensifikasi**

Ekstensifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menyediakan wilayah khusus penambangan dengan memperhatikan fungsi lahan. Indikatornya adalah aspek fisik, aspek biologi, revegetasi.

- a. Aspek fisik adalah kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohong maupun cover crop.
- b. Aspek biologi adalah pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan local, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik daerah tersebut.
- c. Revegetasi adalah upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan sesudah seminar. Penelitian berlokasi di Kecamatan Parangloe Kabupateng Gowa. Dengan alasan meneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitas pasca tambang golongan C.

#### **B. Jenis dan tipe penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini di karenakan penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimna strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitas pasca tambang golongan C di kecamatan parangloe, kabupateng gowa.

##### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologis di maksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai fenomena – fenomena yang terjadi di masyarakat. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialaog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan – pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian terutama dari sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data utama yang dilakukan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### **D. Informan Penelitian**

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan peneliti. Yang menjadi informan peneliti adalah sbb:



NO	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1	Pemeintah Kecamatan	2 ORANG
2	Pemerintah Kelurahan Lanna	1 ORANG
3	Pengusaha Tambang	2 ORANG
4	Tokoh Masyarakat	2 ORANG
5	Perusda Tambang	3 ORANG
	JUMLAH	10 ORANG

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagai mana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka di gunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang di gunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk – bentuk pertanyaan yang berbeda antar informan satu dengan yang lainnya.

#### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis dengan gejala-gejala yang diamat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menyempatkan diri, sebagai pengamat (*recognized observation*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan di teliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas. Kegiatan yang dilakukn untuk memperoleh data yang di perlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen- dokumen yang sudah ada. Hal ini di maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian menggunakan diskripsi kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang di maksud dengan metode deskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Swedangkan pola pikir secara kualitatif artinyaa hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat di selenggarakannya penelitian.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.

### 2. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa informasi yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan adalah lankah terakhir dari

analisis data . penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data.

### **G. Pengabsahan Data**

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti itu juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

#### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.

#### 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna dari data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuaratan atau ketidak akuaratannya. Penelitian ini dilakukan secara interview yaitu dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung dan dapat di wawancara langsung pada sumber penelitian.

#### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenang dengan waktu pengambilan data

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Parangloe dengan Ibu Kota Kecamatan Lanna memiliki luas wilayah 221,26 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,75% dari total wilayah Kabupaten Gowa. Wilayah terluas adalah desa Lonjoboko yaitu 50,77 km<sup>2</sup> (22,95%) sedangkan wilayah terkecil adalah kelurahan Lanna yaitu 18,75 km<sup>2</sup> (8,47%). Sebaagian besar kondisi topografi desa/kelurahan merupakan daerah bukan pantai berupa dataran:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan :Kabupaten Maros
- b. Sebelah timur berbatasan dengan :Kecamatan Tinggi Moncong
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan :Kecamatan Manuju
- d. Sebelah barat berbatasan dengan :Kecamatan Bontomarannu dan Pattallassang

#### 1. Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Parangloe terdiri dari 2 kelurahan dan 5 desa. Wilayah yang berstatus kelurahan adalah Lanna dengan Bontoparang. Sedangkan wilayah yang masih berstatus desa adalah Lonjoboko, Borissallo, Belapunranga, Bontokassi, Belabori. Satuan lingkungan setempat terdiri atas 3 jenjang yaitu dusun/lingkungan, RW/RK, dan RT. Banyaknya satuan lingkungan setempat dari masing-masing jenjang antara lain, 21 dusun/lingkungan, 49 RW/RK serta 107 RT. Jumlah ini relatif tetap kecuali jumlah RW/RK, terdapat penurunan dari tahun 2009.

Kelurahan Lanna Merupakan wilayah kecamatan Parangloe kabupaten Gowa yang terdiri dari 2 organisasi Rukun Warga dan 7 organisasi Rukun Tetangga dengan luas wilayah sekitar 7,29 km<sup>2</sup>. Kelurahan ini dihuni oleh penduduk sebanyak 2.482 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa:

## **2. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Parangloe pada Tahun 2014 sebanyak 17.538 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 8.571 jiwa proporsi 49,12% penduduk perempuan 8.967 jiwa dan 50,82% . Terdapat selisih yang kecil antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh besarnya angka rasio jenis kelamin, yaitu 97 yang berarti terdapat 97 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Dan laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Parangloe dari tahun 2010-2014 berkisar 1.68 dan meningkat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2009-2013. Tentang keadaan kependudukan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa senantiasa menunjukkan perubahan tiap tahunnya, dan cenderung mengalami kenaikan jumlah penduduk. Penduduk yang beragama islam adalah jumlah penduduk yang mendominasi di kelurahan Lanna kecamatan Parangloe kabupaten Gowa yakni sebanyak 2470 jiwa yang tersebar pada 6 (enam) buah mesjid dan 8 orang yang beragama Kristen.

### **3. Sosial**

#### **a. Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Parangloe sudah memadai. Terdapat PAUD (7) 8 (TK) 17 Sekolah Dasar (SDN/INPRES) , 4 Sekolah Menengah Pertama (SLTP/MTs.), dan 3 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) yang tersebar di 7 desa/kelurahan. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ada di Kecamatan Parangloe, partisipasi peserta didik dapat dijabarkan dalam bentuk jumlah Siswa berdasarkan jenis kelamin. PAUD laki-laki 69 perempuan 71 , siswa Taman Kanak-Kanak (TK) laki-laki 80 perempuan 77 , siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN),laki-laki 266 perempuan 248, siswa Sekolah Dasar Inpres (SDInpres), laki-laki 772 perempuan 780 siswa Sekolah Dasar Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), laki-laki 355 perempuan 436 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs.) laki-laki 92 perempuan 72 siswa Sekolah Menengah Umum laki-laki 297 perempuan 324 dan siswa Madrasah Aliyah laki-laki 65 perempuan 62. Jumlah guru yang mengajar setiap jenjang. Pendidikan mulai dari PAUD,TK,SDN,SDI MTS,SMU dan MA masih kurang dan membutuhkan guru terutama guru SD , SLTP dan SMU.yang tersebar di desa / kelurahan di kecamatan Parangloe.

#### **a. Kesehatan**

Mengukur tingkat kesejahteraan seseorang tidak dapat dipisahkan dari faktor kesehatan, baik derajat kesehatannya, maupun akses terhadap fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di kecamatan Parangloe masih

minim tempat-tempat pelayanan kesehatan. Dimana di kecamatan Parangloe Terdapat 21 posyandu, 1 tempat Polindes, 7 puskesmas pembantu, dan 1 Unit Puskesmas Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, kemampuan masyarakat dalam mengakses air bersih menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan warga. Sebagian besar keluarga di kecamatan ini menggunakan air sumur sebagai sumber air untuk minum atau memasak.

#### **4. Ekonomi**

##### **a. Pertanian**

Kecamatan Parangloe mengandalkan tanaman jagung sebagai produksi utama. Terjadi kenaikan jumlah produksi sebesar 7,21% antara tahun 2013 dan 2014. Tidak hanya jagung, tanaman padi sawah menempati posisi teratas dalam jumlah produksinya pada tahun 2014 yaitu sebanyak 5.926 ton menurun sebesar 25,93% dibandingkan tahun 2013. Penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan dibandingkan jenis tanaman lainnya. Selain produksi tanaman padi dan palawija, Kecamatan Parangloe juga menghasilkan produksi tanaman perkebunan. Produksi tertinggi adalah 117,26 ton, untuk jenis tanaman Jambu Mente. Sedangkan produksi yang paling rendah adalah jenis tanaman Panili yaitu hanya 0.15 ton. Disamping itu juga menghasilkan Tanaman Palawija dan hortikultura yaitu; ubi kayu 3.342 ton, ubi jalar 163 ton, dan kacang tanah 49.00 ton

## **b. Lapangan usaha dan perdagangan**

Jenis lapangan usaha yang paling banyak digeluti masyarakat Kecamatan Parangloe adalah perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran. Jumlah perusahaan yang mengelola perdagangan besar/eceran adalah 402 unit untuk lokasi permanen, dan 805 unit untuk lokasi tidak permanen.\* Lapangan usaha di bidang Transportasi, pergudangan dan komunikasi juga merupakan bidang pekerjaan lain yang diminati masyarakat Parangloe. Sedikitnya terdapat 180 perusahaan pada lokasi non-permanen dan 31 perusahaan pada lokasi permanen yang bergerak di bidang ini. Lapangan usaha dibidang penggalian dan pertambangan banyak menyerap tenaga kerja khususnya penggalian pasir dan batu kali yang menggunakan tenaga manusia, juga di pabrik pemecah batu (cruisher). Lapangan usaha dibidang Industri yaitu industri gula merah dimana industri gula merah banyak menyerap tenaga kerja disetiap desa/kelurahan sehingga produksi gula merah banyak di kecamatan Parangloe utamanya di desa Bontokassi dan Borisallo.

## **5. Komunikasi Dan Transportasi**

Sarana jalan dan alat transportasi di Kecamatan Parangloe sebagian besar sudah memadai. Sebagian besar jenis permukaan jalan terluas yang menghubungkan antar desa/kelurahan merupakan aspal khususnya di desa/kelurahan Lonjoboko dan Belabori. Sementara Desa/Kelurahan lainnya lebih banyak menggunakan Ojek Sepeda motor.



Kondisi jalan di Kecamatan Parangloe hampir semua desa memiliki kerusakan di jalan utama. Utamanya di Desa Borissallo yang hampir sepanjang jalan mengalami kerusakan. Karena kondisi ini, jenis angkutan umum yang paling sering digunakan di wilayah ini adalah ojek. Kondisi jalan di Kecamatan Parangloe dari tahun ke tahun semakin rusak karena adanya tambang disepanjang sungai Je'neberang juga disebabkan karena muatan mobil yang mengangkut tambang melebihi dari ketentuan. Disamping perbaikan jalan belum sesuai dengan anggaran yang ada.

**a. Pajak**

Kesadaran masyarakat di kecamatan Parangloe cukup tinggi khususnya dalam Pembayaran PBB dimana dalam pencapaian targetnya selalu tercapai. Target yang diberikan oleh pemerintah di kecamatan Parangloe tahun 2015 sebesar Rp. 606.832.943 dimana Desa/Kelurahan Belabori paling tinggi targetnya sekitar 102 % sekitar 167.499.550 diantara Desa di kecamatan Parangloe yang paling rendah target adalah kelurahan Lanna sekitar 100 % atau sebesar Rp.31.693.951. Dari tahun 2010-2015 selalu tercapai realisasinya dan beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten Gowa. Pendapatan dari sektor Penggunaan jalan yang mana telah dibuat peraturan Desa Masing-masing di kecamatan Parangloe. Yang mana pendapatan tersebut masuk sebagai kas Desa masing masing. Dana tersebut dipakai sebagai biaya operasional dan pembangunan Desa masing-masing.

Pendapatan lainnya yang masuk di kas desa adalah pendapatan pajak dari bidang Rumah makan dan persewaan. Restribusi yang masuk di desa adalah sektor penggalian ,pertambangan dan pabrik pemecah batu (crusher), pendapatan lain yang masuk dikas desa/kelurahan adalah izin pesta perkawinan.

#### **6. Masuknya Perusahaan Pertambangan Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

Masuknya perusahaan jasa pertambangan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ini dilatarbelakangi karena adanya inisiatif dari pihak perusahaan yang melihat potensi didaerah ini yang jika dikelola akan dapat sangat menguntungkan dan berhasil guna.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Perusda mengatakan bahwa :

“Awal masuk PERUSDA ini sendiri itu induknya, yaitu JASKON, tapi kemudian dibentuk lagi menjadi bentuk yang lebih kecil yang bisa lebih dekat juga dengan masyarakat tentunya, bisa dibidang disederhanakan menjadi  *Holding Company* Gowa Mandiri”. (J.S.07/01/17)

Berdiri di tahun 2002 dengan nama JASKON (Jasa Konstruksi) yang kemudian melahirkan suatu perusahaan baru dengan nama  *Holding Company* Gowa Mandiri yang bisa dikatakan sebuah group. Perusahaan ini kemudian resmi masuk ke kelurahan Lanna kecamatan Parangloe kabupaten Gowa pada tahun 2007 setelah menyelesaikan administrasi kepada pemerintah setempat. Proses penyelesaian administrasi dilakukan sesuai prosedur dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Karyawan Perusahaan  *Holding Company Gowa Mandiri* terdiri dari sekumpulan orang-orang yang berasal didaerah atau kota, dan merupakan penggerak utama dari setiap organisasi. Tanpa mereka, organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti. Dalam kegiatan pertambangan galian C ini, pihak perusahaan juga merekrut dan mempekerjakan masyarakat setempat sebagai karyawannya, karena banyak dari masyarakat Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yang ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karyawan merupakan komunitas ekonomis yang termotivasi untuk bekerja berdasarkan kebutuhan keuangan mereka. (Frederic W. Taylor).

Mayoritas penduduk Kelurahan Lanna mengandalkan mata pencaharaian dari bertani dan berkebun selain beternak dan berwirausaha, sebagian lagi menjadi PNS dan TNI/POLRI. Namun muncul fenomena baru seiring dengan menjadinya Parangloe daerah penghasil tambang golongan C yaitu usaha pinggir jalan dan yang berkaitan dengan usaha transportasi pertambangan.

Didalam kegiatan pertambangan, diperlukan adanya strategi dari perusahaan pertambangan agar nantinya dalam melakukan kegiatannya tidak terjadi konflik dan juga tidak menimbulkan permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan, terutama konflik dengan masyarakat sekitar, ini akan mempersulit pihak perusahaan dalam merealisasikan tujuannya. Pembahasan kali ini cenderung bagaimana agar dalam pengoperasiaannya, perusahaan pertambangan dapat tetap memperhatikan permasalahan sosial yang dihadapi disekitar pertambangan. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi agar

hubungan perusahaan pertambangan dan masyarakat dapat berjalan harmonis, dan permasalahan sosial dapat ditekan dan dapat dicarikan solusinya.

Perusahaan punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena pada dasarnya melalui operasi penambangan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya telah terjadi pengambilalihan hak penguasaan sumberdaya milik penduduk setempat. Dalam memenuhi tanggung jawab sosial tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Perusahaan wajib menghormati dan mengakui hak penduduk atas sumberdaya dan lingkungan hidup
- b. Harkat dan martabat, termasuk harkat politik masyarakat harus dihargai
- c. Kesempatan harus diberikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri

Kegiatan pengembangan masyarakat perlu dilakukan oleh perusahaan sedini mungkin, termasuk sebelum kegiatan penambangan itu dimulai. Penyiapan sumberdaya lokal secara dini akan memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi secara baik dengan perusahaan, termasuk memungkinkan tenaga kerja lokal dapat terserap dan berkembang dalam semua jenjang pekerjaan didalam perusahaan. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan sehingga dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

- Memberdayakan masyarakat
- Membangun daerah
- Membina persatuan dan kesatuan bangsa.

## **B. Strategi Yang Dilakukan pemerintah Daerah Dalam merehabilitasi pasca tambang di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Rakyat dan KEPMEN ESDM nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, bahwa dalam setiap penambangan, hal yang utama dalam pengelolaan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi sumber daya mineral meliputi: pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder. Dimana Inventarisasi yang dilakukan setidaknya harus memberikan data dan informasi tentang keadaan geologi, jenis dan sumber daya mineral dan energi, lokasi keterdapatannya, kualitas dan kuantitasnya, serta data dan informasi lainnya yang terkait dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengetahui prospek sumber daya mineral dan energi di suatu wilayah atau tempat.

### **1. Intensifikasi**

Intensifikasi adalah melakukan pengaturan usaha penambangan, indikatornya adalah pengaturan lahan, sistem perijinan dan pengawasan bahan galian golongan C. berikut adalah indikator- indikator yaitu: pengaturan lahan, sistem perijinan, dan pengawasan.

#### **a. Pengaturan Lahan**

Pengaturan lahan dilakukan dengan tujuan agar lahan yang digunakan untuk lokasi tambang tidak mengganggu area tempat tinggal penduduk sekitar. Seperti yang di katakan bapak Camat adalah:

Menurut Pemerintah kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

“Setiap warga yang mempunyai lahan pada area pertambangan dan memiliki surat izin pertambangan berhak untuk melakukan pertambangan dengan memperhatikan peraturan – peraturan dari proses pertambangan yang ada, dan lokasi yang akan dilakukan pertambangan jauh dari pemukiman warga, saya mengkoordinasikan mengenai adanya lokasi tambang yang dioperasikan agar tidak lagi meluaskan lokasinya dan lahan yang sudah ditetapkan harus dituruti, karena lokasi pertambangan berada pada area akses jalan besar”(M.T. 04/01/2017)

Pertambangan yang di lakukan oleh para pengelola tambang harus sesuai dengan peraturan pengelolaan pertambangan dan lokasi pertambangan jauh dari pemukiman warga ini untuk menghindari dampak negatif di masa yang akan datang dalam pengelolaan tambang melakukan kegiatan pertambangan tentu akan merusak lingkungan hidup sehingga di lingkungan tersebut dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itulah sebabnya dalam melakukan pemberian izin pertambangan pada pengelola pertambangan harus betul-betul kepada yang berhak untuk mendapatkan surat izin pertambangan dan prosedur-prosedur yang di lakukan sudah mematuhi aturan yang ada.

Menurut pengusaha tambang mengatakan bahwa:

“Betul dalam melakukan pertambangan harus jauh dari pemukiman warga ini agar dampak dari pertambangan, masyarakat tidak mendapatkan hal – hal yang tidak di inginkan dan kami para penambang juga harus sadar akan hak dan kewajiban kami sebagai pengelola tambang” (D.B. 04/01/2017)

Hak dan kewajiban dalam mengelola pertambangan berada dalam izin pertambangan bahwa pengelola pertambangan harus sesuai aturan yang ada pada surat izin pertambangan. Ini agar pengelola pertambangan tidak semena – mena dalam pertambangan harus sesuai dengan aturan yang ada,

dan sanksi yang akan di berikan apabila ada pelanggaran dalam proses pertambangan. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang IUP juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Parangloe mengemukakan bahwa:

“Dalam pengelolaan pertambangan betul harus jauh dari pemukiman warga seperti yang dilihat sendiri bahwa tambang yang ada didaerah ini lumayan jauh dari pemukiman warga”(D.M.04/01/2017)

Jarak antara pertambangan dan pemukiman yang ada di daerah kecamatan parangloe sudah lumayan jauh. Dan warga yang ada di sekitar pertambangan juga tidak cemas akan dampak dari proses pertambangan ini.

#### **b. Sistem Perijinan**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pembukaaan lahan pertambangan menyatakan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Dimana pembukaan lahan pertambangan tersebut membutuhkan izin sebagaimana yang tertera pada aturan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 mengenai a) Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan b) izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menurut Direktur perusda Tambang mengatakan bahwa:

“Betul dalam setiap melakukan proses pertambangan harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pemerintah pemerintah tentang kelayakan tambang apakah betul – betul wilayah tersebut bisa untuk diadakan proses pertambngan dan jika tidakn melakukan izin usaha pada pemerintah setempat maka akan dianggap melakukan pelanggaran”(wawancara dengan, JS.04/01/2017).

Senada dengan Pemerintah kelurahan Lanna yang mengatakan bahwa :

“Betul dalam melakukan pertambangan para penambang melakukan pengurusan surat izin pertambangan, dan kami para pemerintah memberikan izin usaha pertambangan jika betul-betul memenuhi isyarat dalam melakukan proses pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat”(M.T.04/01/2017).

Para penambang sudah melakukan prosedur, dengan melakukan proses pertambangan dengan mengurus IUP pada Pemerintah. Sebelum melakukan proses pertambangan, pengurusan izin usaha pertambngan, Sekarang prioritas pemerintah adalah melakukan penataan dan pengetatan terhadap IUP yang ada supaya ke depan aktivitas industri tambang minerpa tetap berjalan dan investasi tidak terkendala. Untuk aspek pidana lingkungan, kita sudah memiliki UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pelanggaran atas aspek lingkungan, pada konteks apapun, mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Menurut perusda tambng mengatakan bahwa:

“Setiap melakukan usaha pertambangan mewajibkan rehabilitas bagi pemegang IUP yang mewajibkan pemegang IUP untuk



melaksanakan rehabilitas pasca tambang. Pemda juga dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara, dan pencabutan IUP. Bila kegiatan rehabilitas pasca tambang tidak dilakukan pemegang IUP, dan kondisi lingkungan bekas kegiatan pertambangan tercemar, maka pemegang IUP dapat dituntut pidana.” (wawancara dengan JS,0 4/01/2017)

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa bahwa pemegang IUP wajib melakukan penyampaian pasca tambang yaitu merehabilitasi sesudah melakukan pengelolaan pertambangan, dan peraturan yang memuat tentang reklamasi pasca tambang menjadi kekuatan Pemda dalam mewajibkan pelaksanaan kegiatan reklamasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Dasar Hukum pelaksanaan reklamasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan terdapat pada : (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (2) PP Nomor. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; (4) Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; (5) Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambang.

Hasil wawancara lainnya dengan Staf Perusda Pertambangan mengatakan bahwa:

“kami dari Perusda mewajibkan rehabilitasi bagi pemegang IUP adalah undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan pertambangan, termasuk di dalamnya reklamasi. Artinya, dengan Undang-Undang tersebut, pergerakan kami memiliki kekuatan hukum yang jelas. Ketika ada pemegang IUP yang melanggar kewajiban rehabilitasi, dapat kami beri tindakan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.” (Wawancara dengan MS, 04/02 2017)

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa undang-undang dan peraturan yang memuat tentang reklamasi dan pascatambang menjadi kekuatan Perusda dalam mewajibkan pelaksanaan kegiatan reklamasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Dasar Hukum pelaksanaan reklamasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan terdapat pada : (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (2) PP Nomor. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; (4) Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; (5) Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Umum.

Hasil wawancara dengan Kasi Operasional perusda Pertambangan mengatakan bahwa:

“Walaupun rekan-rekan kerja di sini sudah tergolong lama dan memiliki banyak pengalaman di bidang pertambangan, saya yakin mereka adalah orang-orang yang cerdas dan terampil, sebab melihat semangat kerja mereka selama ini. memiliki teman-teman kerja seperti di Perusda ini sangat menyenangkan, mereka selalu

bersemangat dalam berkerja dan saling membantu bila ada pekerjaan yang bisa diselesaikan bersama.” (wawancara dengan WP, 04/02/2017)

Pegawai yang profesional dan berkompeten sangat mempengaruhi kapasitas yang dimiliki suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun organisasi memiliki sistem yang baik, informasi yang berharga, dan teknologi yang canggih sekalipun akan menjadi sia-sia jika anggota-anggota organisasi tidak memiliki skill dan kemampuan untuk memanfaatkan perangkat pendukung yang ada demi meningkatkan kinerja organisasi. Hal yang sama berlaku juga pada organisasi pemerintah. Skill dan kemampuan anggota organisasi atau pegawai pemerintah biasanya diperoleh dari pendidikan formal dan non formal serta pengalaman-pengalaman yang pernah ditempuh oleh seseorang. Namun yang terpenting dari semua itu adalah semangat kerja yang ada pada diri tiap-tiap pegawai. Walaupun, seorang pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan profesinya saat ini, jika dia adalah seseorang yang memiliki semangat kerja yang baik, maka tidak sulit baginya untuk meningkatkan skill dan kemampuan di bidang kerja atau profesinya melalui lembaga diklat atau lembaga kursus yang ada.

Hasil penelitian penulis bahwa kekuatan Perusda dalam mewajibkan rehabilitasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan adalah undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan

reklamasi dan pascatambang serta semangat kerja yang sangat baik dari pegawai Perusda.

### **c. Pengawasan**

Pengawasan bahan galian untuk melakukan kegiatan pertambangan dirasakan sangat penting. Dimana kegiatan pertambangan banyak memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan kegiatan angkutan hasil galian tambang di lokasi tersebut, untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Seperti yang diketahui bahwa usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Sehingga membutuhkan pengawasan yang intens dari pemerintah setempat.

Menurut Pemerintah kecamatan Parangloe mengemukakan bahwa:

“kami pemerintah setempat terlibat dalam pengawasan pertambangan ini mulai dari terdirinya tambang sampai pada rehabilitas pasca tambang, pengawasan yang kami lakukan mulai dari pengawasan jam kerja dan pengawasan pada proses rehabilitas pasca tambang”(M.T.04/01/2017)

Aspek rehabilitasi dan pasca tambang sangat penting dalam praktik pertambangan. Kegagalan menjalankan dua hal ini berakibat buruk bagi lingkungan yang ujungnya berdampak pada masyarakat. Sayangnya,

koordinasi dan perhatian pemerintah masih minim dalam memastikan pelaku usaha memenuhi rehabilitasi dan pasca tambang ini.

Menurut tokoh masyarakat mengemukakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat juga terlibat dalam pengawasan proses pertambangan yaitu kami mengawasi para pengelola yang lewat batas waktu pertambangan dan melaporkan kepada pemerintah setempat untuk di tindak lanjuti”(D.S.06/01/2017)

Masyarakat juga terlibat dalam pengawasan dalam proses pertambangan, pemerintah dan masyarakat melakukan kerjasama dalam melakukan pengawasan pertambangan ini agar mencegah terjadinya tindak kecurangan pada proses pengelolaan pertambangan. Dalam keterlibatan pengawasan masyarakat juga mengurangi rasa kekwatiran pada dampak dari pertambangan itu sendiri.

## **2. Ekstensifikasi**

Ekstensifikasi adalah menyediakan wilayah khusus penambangan dengan memperhatikan fungsi lahan. Indikatornya adalah adanya tempat khusus penambangan menurut jenis bahan galian. Adanya tempat umum khusus penambangan menurut jenis bahan galian adalah upaya yang sangat sesuai untuk memberikan jaminan keamanan dan kelestarian lingkungan. Berikut adalah indikator- indikator yaitu: Aspek fisik, Aspek biologi, Aspek sosial dan budaya, dan Aspek kesehatan dan Keamanan.

### **a. Aspek fisik**

Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohong maupun *cover crop*.

Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kwalitas taanah.

Menurut pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“Rehabilitas harus di lakukan dalam pasca pertambangan secara fisik adalah dengan cara memberi timbunan pada lokasi lahan bekas tambang yang di tinggalkan agar mengantisipasi terjadinya erosi pada lokasi lahan bekas pertambangan”(wawancara dengan M.T.04/01/2017)

Pemerintah daerah melakukan rehabilitas dengan melakukan penimbunan pada lahan bekas tambang agar tidak adanya dampak negatif di masa yang akan datang dan tidak adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para penambang.

Menurut Pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“Kami dari kelurahan lanna bekerjasama dengan pemerintah kecamatan tentang rehablitasi fisik yang dilakukan setelah pasca tambang membantu mengarahkan bagaimana baiknya setelah rehabilitasi dilakukan ini, kami melakukan agar masyarakat yang ada di daerah lanna merasa terlindungi dari pemerintah” (wawancara dengan, M.T.04/01/2017)

Adanya kerjasama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah ini bertujuan agar masyarakat yang ada di daerah lanna merasa di pedulikan oleh pemerintah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“kami juga terlibat dalam rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah kami ikut berpartisipasi dalam proses rehabilitasi ini agar pemerintah dan kami masyarakat bisa menyatu dalam kerjasama untuk kebaikan di areah ini”(wawancara dengan DR.04/01/2017)

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam proses rehabilitasi fisik di Kecamatan Parangloe, Pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang ada di daerah lanna, dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses rehabilitasi pasca tambang maka dampak dari pertambangan yang dilakukan tidak terlalu beresiko di masa yang akan datan. Seperti dari dampak dari banyaknya longsor erosi yang mengakibatkan lapisan tanah yang semakin menipis maka ini diakan rehabilitas fisik yaitu menimbung seperti yang di lakukan masyarakat dan pemerintah kecamatan parangloe.

Rusaknya infrastruktur jalan yang diakibatkan proses pertambangan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah Daerah dibantu dengan pemerintah kecamatan senantiasa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Hal ini diungkapkan oleh Pemerintah kecamatan:

“Tentu kami dari pemerintah senantiasa memperhatikan fasilitas publik yang tersedia termasuk jalan. Maka disini tentu dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah, kecamatan, serta dari pihak tambang itu sendiri, agar jalanan yang selalu kita lewati dalam kondisi baik, dan proses pertambangan ju ga terus berjalan” (hasil wawancara dengan, SS. 05/01 2017)

Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C didaerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan beban diatasnya yang setiap hari dilalui oleh

truk-truk berbadan besar (Tonase muatan kendaraan tidak sebanding dengan Tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya jalan menuju desa yang menjadi lokasi galian C tersebut rusak parah sehingga masyarakat susah untuk menuju dan ke luar apabila menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat yang relatif kecil lainnya.

Menurut Pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“kami dari pemerintah kelurahan memperhatikan fasilitas publik salah satunya adalah masalah kerusakan jalan yang di laluai pengangkut bahan galian C, kami dan pemerintah kecamatan bekerjasama dengan masyarakat untuk menimbung dan memperbaiki jalan yg rusak akibat pertambangan”(wawancara dengan, MT. 04/01/2017)

Dapat di simpulkan bahwa pemerintah setempat memperhatikan jalanan yang rusak akibat pertambangan yang di lauli oleh truk pengangkut bahan galian C.

Menurut tokoh msyarakat mengatakan bahwa:

“kami siap membantu pemerintah setempat untuk memperbaiki kerusakan jalan yang telah di lalui oleh truk pengangkut dan kami berharap semua bisa berjalan dengan baik”(wawancara dengan, DM.07/01/2017)

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat bekerjasama dengan dengan pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak yang ada di parangloe gowa dan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah



mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak

#### **b. Aspek Biologi**

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan local, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentang terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasaakan sulit berhasil.

Menurut Pemerintah kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

“Dalam rehabilitas aspek fisik kami juga merehabilitas aspek biologi, yang kami lakukan dalam rehabilitas aspek biologi adalah melakukan peghijauan yang kami lakukan adalah menanami pohong lahan pasca tambang ini juga bertujuan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya longsor akibat dari tambang yang di tinggalkan”(wawancara dengan. SS.06/01/2017)

Berbagai aspek yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakuakn rehabilitas di lokasi pasca tambang, aspek biologi ini dilakukan agar setelah terjadinya rehabilitasi di lokasi pasca tambang keadain lingkungan ini kembali normal meski tidak senormal sebelum melakukan pertambangan, tetapi dalam upaya yang di lakukan oleh pemerintah ini berjuan untuk agar apek biologi ini mencegah kerusakan lingkungan pada daerah lokasi pasca tambang.

Menurut pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“Kami dari pemerintah kelurahan bekerjasama dengan masyarakat, untuk memperbaiki kembali lahan - lahan bekas tambang yang di tinggalkan perlu ada rehabilitas seperti yang di katakan pemerintah kecamatan perlu ada kerjasama untuk merehabilitas tambang yang di tinggalkan agar tidak merusak lingkungan” (wawancara dengan. M.T.04/01/2016)

Kerjasama pemerintah dan masyarakat hanya dapat terwujud jika faktor personal masyarakat dapat menunjukkan perilaku atau sikap yang positif terhadap keberadaan lingkungan. Hal ini merupakan faktor penting yang dapat membawa masyarakat dapat menjadi lebih berdaya dalam turut serta menentukan arah perbaikan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berada di lokasi masyarakat.

Menurut Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami sadar bahwa memang harus ada perbaikan lingkungan di daerah kami seperti penimbunan lahan – lahan pertambangan yang di tinggalkan agar kami bisa melakukan penanaman pohon atau penghijauan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan”(wawancara dengan. DR.04/01/2017)

Kesadaran masyarakat memang perlu karna apabila tidak ada proses perbaikan tambang atau penimbunan kembali lahan pasca tambang maka masyarakat tidak bisa melakukan penanaman kembali penghijauan. Masyarakat sadar bahwa komunikasi dua arah untuk menyepakati tentang arah dan kebijakan rehabilitasi perlu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat secara luas yang wilayah dan kehidupan mereka terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Meskipun Indonesia terkenal sebagai ‘paru-paru dunia’, namun kondisi kerusakan hutan terutama hutan hujan tropis semakin memprihatinkan. Akibat dari aksi penebangan liar yang tidak bertanggung

jawab ini, hutan-hutan di Indonesia kini banyak yang rusak. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan melakukan upaya reboisasi atau penghijauan kembali. Program reboisasi ini perlu dilakukan untuk membenahi lahan-lahan atau hutan-hutan yang gundul dan rusak

Menurut Pemerintah kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

“kami dari pemerintah kecamatan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan rehabilitas atau perbaikan di daerah pertambangan yang sudah ditinggalkn, lahan – lahan yang sudah di tinggal kami menimbung dan melakukan penghijauan dan lahan pertanian supaya masyarakat bisa bertani di area lahan pasca”(MS.06/01/2017)

Dilihat dari wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa ketika adanya proses reboisasi, penghijauan masyarakat dapat melakukan pertanian di daerah yang sudah di timbung maka petani dapat bertani diastasnya walaupun tanah tidak terlalu baik.

Menurut Pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“kami juga kersama dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat supaya proses reboisai dan penghijauan berjalan dengan baik dan lancar suapaya masyarakat bisa melakukan aktivitas di lahan pasca yang sudah di rehabilitas” (wawancara dengan. M.T.04/01/2016)

Dilihat dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan bekerjasama dalam melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah lahan bekas tambang ini semua dilakukan supaya ada pencegahan kerusakan lingkungan.

Menurut tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“kami dari masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk proses rehabilitas lahan pasca tambang supaya kami bisa melakukan bertani di daerah lahan pazca yang sudah di frehabilitas” (wawancara dengan. DS.04/01/2016)

Dapat di simpulkan bahwa dari proses reboisasi dan penghijauan ada kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.

### c. Revegetasi

Revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas tambang sebagai usaha menghindari erosi lahan, membangun habitat bagi satwa liar, biodiversitas, memperbaiki produktivitas dan kestabilan tanah, memperbaiki kondisi lingkungan. Model revegetasi dalam rehabilitasi lahan yang terdegradasi terdiri dari beberapa model antara lain restorasi (memiliki aksentuasi pada fungsi proteksi dan konservasi serta bertujuan untuk kembali ke kondisi awal), reforestasi dan agroforestri. Tujuan revegetasi ini menjaga lahan terkena erosi dan aliran permukaan yang deras; membangun habitat bagi satwaliar; membangun keanekaragaman jenis-jenis lokal; memperbaiki produktivitas dan kestabilan tanah; memperbaiki kondisi lingkungan secara biologis dan estetika; dan menyediakan tempat perlindungan bagi jenis-jenis lokal dan plasma nutfah. Perbaikan kondisi tanah meliputi perbaikan ruang tubuh, pemberian tanah pucuk dan bahan organik serta pemupukan dasar dan pemberian kapur. Kendala yang dijumpai dalam merestorasi lahan bekas tambang yaitu masalah fisik, kimia (*nutrients dan toxicity*), dan biologi. Masalah fisik tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Masalah kimia tanah berhubungan dengan reaksi tanah (pH), kekurangan unsur hara, dan mineral *toxicity*. Untuk mengatasi pH yang rendah dapat dilakukan dengan

cara penambahan kapur. Sedangkan kendala biologi seperti tidak adanya penutupan vegetasi dan tidak adanya mikroorganisme potensial dapat diatasi dengan perbaikan kondisi tanah, pemilihan jenis pohon, dan pemanfaatan mikroriza.

Menurut pemerintah kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

“Revegetasi yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya erosi di area lahan – lahan bekas tambang maka kami dari pihak pemerintah kecamatan melakukan rehabilitasi tambang di area lahan bekas tambang untuk melakukan penghijauan”(MS.06/01/2017)

Menurut tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“masyarakat cukup mengetahui bahwa revegetasi merupakan upaya perbaikan lahan akibat pertambangan, Masyarakat sadar bahwa komunikasi dua arah untuk menyepakati tentang arah dan kebijakan rehabilitasi perlu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat secara luas yang wilayah dan kehidupan mereka terganggu akibat kegiatan pertambangan”.(wawancara dengan. DN.04/01/2017)

Berdasarkan temuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat menyadari bahwa degradasi lingkungan dan ekosistem akibat pertambangan perlu dilaksanakan rehabilitasi. Masyarakat merasa sangat berkepentingan dalam reklamasi karena kondisi lahan tidak saja berpengaruh pada pemilik lahan tetapi berpengaruh luas terhadap kehidupan di wilayah tersebut.

Kembali Pemerintah kelurahan Lanna mengatakan bahwa:

“Setiap ada pertambangan maka ada juga namanya revegetasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan saya setuju dengan yang di kemukakan oleh masyarakat bahwa kebijakan rehabilitasi perlu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat secara luas yang wilayah dan kehidupan mereka terganggu akibat kegiatan pertambangan” (wawancara dengan. M.T.04/01/2017)

Berdasarkan temuan diatas maka dapat di simpulkan bahwa proses rehabilitas dapat mencegah keruskan lingkungan diaerah pemukiman masyarakat dan masyearakat tidak terganggu lagi akibat adanya pertambngan walaupun jauh dari lingkungan masyarakat.

Memang tragis bila kita melihat kondisi lingkungan sekarang ini. Kerusakan lingkungan ada di mana-mana. Sekitar 60 persen muka bumi telah mengalami kerusakan lingkungan mulai dari level yang ringan hingga level kerusakan yang sangat parah. Kerusakan lingkungan ini tentu saja akan membawa dampak negatif bagi semua umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, perlu adanya upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan upaya pemulihan lingkungan agar pulih dan lestari. Berikut terdapat beberapa upaya untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan.

### C. Faktor Penghamabat Dan Pendukung Dalam Rehabilitasi Pasca Tambang di kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

#### 1. Faktor Pendukung

##### a. **Komunikasi yang baik**

Komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak perusahaan sudah terjadi bahkan sebelum terjadinya segala aktifitas pertambangan, ini merupakan suatu pendekatan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Staf Perusda tambang bahwa :

“Kita mendekati masyarakat pada awalnya dengan komunikasi yang baik, kemudian kita harus memikirkan sebuah plening, lalu plening tersebut kita komunikasikan dengan masyarakat yang

mengetahui gambaran tentang lokasi itu sebelum turun langsung kelapangan untuk melakukan rehabilitasi pada lokasi pasca pertambangan, dengan plening yang baik dan matang untuk mengharapkan hasil rehabilitasi dengan baik”. (wawancara dengan. J.S. 8/01/17)

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, sebisa mungkin melibatkan pegawai perusahaan tambang baik yang berasal dari daerah setempat ataupun dari luar daerah. Hal ini untuk menjembatani komunikasi dan hubungan baik antara pegawai perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar. Ada kalanya konflik yang terjadi terlebih dahulu disebabkan hubungan yang kurang baik/harmonis antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga rentan terjadi kesalahpahaman dan menyulut perseteruan yang lebih besar. Para pegawai perusahaan harus disosialisasikan. Para pegawai sebaiknya memahami apa yang boleh/tidak boleh dilakukan atau sebisa mungkin dihindari untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat apalagi dalam rangka untuk merahabilitasi lokasi pasca pertambangan harus dilakukan komunikasi yang baik agar hasil dalam proses rehabilitasi berjalan dengan baik sesuai dengan hasil dengan baik.

Tahapan yang biasanya memerlukan komunikasi yaitu dalam perencanaan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa perencanaan berarti suatu kegiatan merumuskan keinginan yang berkembang di masa mendatang, dalam perencanaan ini, masyarakat dilibatkan untuk mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan kawasan

pertambangan. Yang diprioritaskan tentunya masyarakat yang berada disekitarnya yang betul-betul tau tentang kondisi didaerah tersebut.

**b. Pengusaha tambang dilibatkan langsung**

Pelibatan pengusaha tambang dalam kegiatan rehabilitasi di kelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa ini sudah merupakan sesuatu yang mutlak bagi perusda tambang. Tentunya ini merupakan terobosan baru bagi dunia pertambangan, karena jarang sekali ada usaha pertambangan yang memprioritaskan kemakmuran masyarakat dengan cara merehabilitasi lokasi pasca pertambangan. Tak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat menggunakan berbagai media baik secara formal maupun informal untuk melakukan perencanaan rehabilitasi sampai ke tahap hasil rehabilitas tercapai.

Perusahaan tambang dan pemerintah daerah dapat membuat publikasi khusus terkait manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar dalam proses rehabilitasi pasca tambang. Publikasi ini disebarakan ke berbagai kelompok masyarakat seperti ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, LSM, RT/RW, kelurahan hingga ke jajaran pemerintah daerah. Para siswa sekolah hingga mahasiswa juga dapat dilibatkan membuat publikasi tentang plening rehabilitasi sampai pada hasil rehabilitasi tersebut misalnya dengan memanfaatkan media publikasi yang dibuat oleh mereka seperti pada majalah dinding hingga media publikasi di kampus. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan



haknya untuk mengawasi segala bentuk rehabilitasi pasca pertambangan yang dilaksanakan di daerah mereka.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan mengatakan bahwa:

“Selain pemerintah daerah dan mitra dari luar, masyarakat juga mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengawasi rehabilitasi pasca pertambangan pada daerah atau lokasi di daerahnya sehingga mereka memperoleh hak mereka untuk diberdayakan oleh pemerintah dan perusahaan tambang”. (wawancara dengan. SS. 07/01/17).

Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa memang benar dalam proses controlling atau pengawasan dalam proses rehabilitasi itu juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Peneliti menjumpai beberapa orang yang bertindak sebagai pengawas di sekitar lokasi tambang, tujuannya jelas yaitu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses rehabilitasi.

## **2. Faktor Penghambat**

Hadirnya perusahaan jasa pertambangan selain memberikan keuntungan sendiri kepada masyarakat juga tak lepas dari adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan. Fakta tersebut menjadi indikasi bahwa banyak warga yang sudah pandai dalam melihat peluang dengan adanya tambang.

### **a. Penolakan masyarakat**

Terhambatnya proses rehabilitasi pasca tambang karena adanya penolakan masyarakat di lokasi dekat tambang yang akan di rehabilitasi.

Masyarakat menolak akan rehabilitas karena tambang yang akan di rehabilitas dekat dengan lahan pertanian mereka.

Seseperti yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat:

“kami menolak akan rehabilitas karena lahan pertanian dekat dengan lokasi yang akan direhabilitas, takutnya nanti lahan pertanian rusak karena adanya rehabilitasi dilakukan”(wawancara dengan DM/09/01/2017)

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya rehabilitas karena takut dengan rusaknya lahan pertanian akibat rehabilitasi pasca tambang. Lokasi yang akan di rehabilitas memang dekat dengan lahan pertanian masyarakat sehingga menghambat proses rehabilitasi dan jalan yang dilalui oleh mobil truk di tutup oleh masyarakat karena masyarakat takut akan adanya rehabilitas.

#### **b. Kurangnya bibit untuk penghijauan**

Selain adanya penolakan masyarakat, kurangnya bibit untuk penghijauan juga menghambat proses rehabilitasi karena bibit untuk penghijauan itu sangat penting dalam proses rehabilitasi.

Seperti yang dikatan ole pemerintah kelurahan lanna:

“dalam terhambatnya proses rehabiltasi karena kurangnya pasokan bibit untuk melakukan penghijauan di lokasi rehabilitas sehingga proses rehabilitasi penanaman bibit pohon menjdi terhambat” (wawancara M.T 04/01/7)

Dapat di simpulkan bahwa kurangnya bibit untuk melakukan penghijauan di lokasi rehabilitas menjdi terhambat karena paoskan bibit kurang sehingga menghambat proses rehabilitasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari suatu penelitian adalah kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan penelitian. Pada akhir bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitasi Sudah terealisasi namun kurangnya pengawasan setelah rehabilitasi pasca tambang selesai terlaksana, tambang yang sudah di rehabilitasi tidak di perhatikan oleh pemerintah daerah. Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan rehabilitasi pasca tambang yaitu 1) Intensifikasi, a). penaturan lahan, b) sistem perijinan, c) pengawasan, dan 2) ekstensifikasi, a) aspek fisik, b) aspek biologi, c) rehabilitasi lahan.
2. faktor penghamabat dan pendukung dalam rehabilitasi pasca tambang yaitu: 1) faktor pendukung a) Komunikasi yang baik, b) Pengusaha tambang dilibatkan langsung, 2) faktor penghamabat yaitu: a). Penolakan masyarakat, b) Kurangnya bibit untuk penghijauan.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi pemerintah daerah dan perusahaan Perusda pertambangan, sekiranya harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di Kelurahan Lanna, dan membuka lowongan lagi kepada lebih banyak masyarakat untuk bisa bekerjasama. Serta harus membantu memperbaiki

akses jalan diParangloe agar mulus kembali karena mengingat jalanan sekarang yang sudah rusak Karana dilalui alat berat setiap harinya dan pengawasan se sudah rehabilitas harus di lakukan dengan baik.

2. Bagi masyarakat asli Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, agar lebih jeli melihat potensi didaerah sendiri agar tidak gampang diperdaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan selalu sadar akan hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan yang sah asli daerah serta mampu memberdayakan diri sesuai keahlian masing-masing sehingga terhindar dari dominasi orang luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, Jaelan Usman, dan Handam. 2012. *Peran pemerintah desa dalam pengelolaan pertambangan rakyat di desa borisallo kecamatan parangloe kabupaten gowa*. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makaasar. Vol. II No. 1
- B.Susigit. 2008. *Dasar-dasar Pengawasan Teknis Pertambangan Direktorat Teknik Mineral dan Batubara dan Panas Bumi*, Jakarta.
- Boyne, George A. dan Richard M. Walker. 2004. "Strategi Content and Public Service Organizations". *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 14 (2):231-52
- Bryson, jhon 1995, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Heene dkk, 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Herlina**, 2004. *Melongok Aktivitas Pertambangan galian golongan C Di Tabalong, Reklamasi 100 Persen Mustahil*. Banjarmasin Post, Banjarmasin
- Hery, 2013. *Pengantar Manajemen: Cara Cepat dan Mudah Memahami Manajemen*, Yogyakarta: Gava Media.
- <https://ml.scribd.com/doc/220373498/Pengertian-Reklamasi-Rehabilitasi-Dan-Restorasi-Lahan>.
- Karliansyah, M.R., 2001. *Aspek Lingkungan Dalam AMDAL Bidang Pertambangan*. Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL Jakarta.
- Kearns, Kevin P. 1992. *From Comparative Advantage To Damage Control: Clarifying Strategic Issue Using Swot Analysis, Nonprofit Management And Leadership* 3.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, Strategik Dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- Marrus, S, K. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press

Miles. R.E., dan Snow. C. (1978), *Organizational Strategy, Structure, and Process*, New York, NY: McGraw-Hill.

Mulyana, 2005. *pengertian kelompok*, Diakses melalui <http://site.google.com/site>, pada tanggal 2 Januari 2017.

Muhammad, Suwarsono, 2013. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*, Jakarta : Erlangga.

Pickton, W. D dan Wright S, 1998. *What's Swot In Strategic Analysis?. Strategic Change*, 7(2), 101-109.

Rangkuti, f. 2005. *Teknik Membuat Perencanaan Bisnis Dan Analisis Kasus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Saladin, Djasmin. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya

Soemantri, 1976. *Istilah pemerintahan*, Diakses melalui <http://site.google.com/site>, pada tanggal 3 Januari 2017.

Syafiie, 2002. *Istilah ilmu pemerintahan* Diakses melalui <http://site.google.com/site>, pada tanggal 2 Januari 2017.

T.Ridwan. 2007. *Dampak Lingkungan Pertambangan*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Diklat Energi Sumber Daya Mineral, Pusat Diklat Teknologi Mineral dan Batu Bara Bandung.

Umar, Husein, 2003. *Strategic Management In Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Utrecht, 1986. *Istilah pemerintahan*, Diakses melalui <http://site.google.com/site>, pada tanggal 3 Januari 2017.

Wechsler, Barton dan Robert W. Backoff . 1986. "Policy Making and Administration in State Agencies: Strategic Management Approaches". *Public Administration Review*, Juli/Agustus:321-27

Wechsler, B., & Backoff, R. (1986). Policy making and administration in state agencies: Strategic management approaches. *Public Administration Review*, 46, 321-327.

### **Undang-undang**

UU No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1, *Tentang Pemerintahan Daerah*

UU No 32 tahun 2009, *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

UU No 4 tahun 2009, *tentang penambangan mineral dan batu bara*

## RIWAYAT HIDUP



**MUHAMMAD RIZAL.** Lahir di Sarroangin tanggal 1 Maret 1995, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Tojeng dan Noro'

Penulis mulai masuk jenjang pendidikan formal di SD Inpres Sapaya pada tahun 2001 kemudian penulis lanjut pada tahun yang sama 2007 dan tamat pada tahun 2009 di SMPN 1 Bungaya Kabupaten Gowa, setelah itu penulis lanjut Sekolah Menengah Atas dan pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012 di SMAN 1 Bungaya. Setelah tammat SMA tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, ditahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Strata Satu (S1), Melalui jalur umum.